

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	v
KATA PENGANTAR EDISI REVISI, CETAKAN KE-3	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii

1

PEMAHAMAN SEKILAS TENTANG SISTEM HUKUM INDONESIA 1

–Shidarta–

A. Pengertian tentang Hukum	1
B. Pengertian Sistem Hukum	2
C. Latar Belakang Sejarah Sistem Hukum Indonesia	6
D. Sumber Materiel Hukum Indonesia	12
E. Sumber Formal Hukum Indonesia	17
F. Hukum Bisnis	23
G. Penutup	26
DAFTAR PUSTAKA	28

2

HUKUM BENDA 31

–Siti Yuniarti–

A. Pendahuluan	31
B. Sistematika Hukum Benda	33
C. Jenis Benda	33
1. <i>Bezit</i> (Kedudukan Berkuasa)	35
2. <i>Levering</i> (Penyerahan)	36
3. <i>Verjaring</i> (Kedaluwarsa/Lewat Waktu)	36
4. <i>Bezwaring</i> (Pembebasan/Jaminan)	36
D. Asas-asas dalam Hukum Benda	36
E. Hak Kebendaan	37
F. Hak Kebendaan yang Memberikan Kenikmatan	38

G. Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan	39
1. Gadai	40
2. Hipotek	41
3. Hak Tanggungan	41
4. Fidusia	42
5. Jaminan Resi Gudang	42
H. Penutup	43
DAFTAR PUSTAKA	45

3

HUKUM PERJANJIAN

47

–Erni Herawati–

A. Pendahuluan	47
B. Pengertian Perjanjian	47
C. Asas-asas Perjanjian	49
1. Asas Konsensualisme	49
2. Asas Kebebasan Berkontrak	50
3. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> / Kekuatan Mengikat Suatu Kontrak	50
4. Asas Iktikad baik	50
D. Syarat Sah Perjanjian	51
E. Perikatan	56
F. Prestasi dan Wanprestasi	57
G. Hapusnya Perikatan	59
DAFTAR PUSTAKA	59

4

HUKUM PERUSAHAAN

61

–Erni Herawati–

A. Pendahuluan	61
B. Jenis Perusahaan	62
1. Usaha Perorangan	64
2. Perusahaan Bukan Badan Hukum	65
a. Persekutuan Perdata (<i>Maatschap</i>)	65
b. Firma	66
c. Perseroan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap/CV</i>)	67
3. Perusahaan Berbadan Hukum: Perseroan Terbatas (PT)	69
a. Definisi Perseroan Terbatas	69

b. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas.....	70
c. Organ Perseroan Terbatas	71
C. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

5

HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL 77

–Besar–

A. Pengertian	77
B. Dasar Hukum.....	78
C. Jenis-jenis Kekayaan Intelektual	78
D. Hak Cipta.....	80
1. Pengertian Hak Cipta.....	80
2. Dasar Hukum Hak Cipta	81
3. Objek Hak Cipta	81
4. Batasan Terhadap Pemberian Hak Cipta.....	82
5. Perlindungan Hukum Hak Cipta	84
6. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta.....	84
E. Paten.....	85
1. Pengertian Paten.....	85
2. Objek Hak Paten.....	86
3. Perlindungan Hukum bagi Hak Paten	86
4. Prosedur Permohonan Pendaftaran Paten.....	87
F. Merek	87
1. Pengertian Hak Merek.....	87
2. Batasan Terhadap Merek	88
3. Permohonan Merek yang ditolak	88
4. Perlindungan Hukum Merek	89
5. Prosedur atau Tata Cara Pendaftaran Merek	89
G. Desain Industri	90
1. Pengertian Desain Industri	90
2. Lingkup Desain Industri.....	90
3. Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri	91
4. Pendaftaran Desain Industri.....	91
H. Rahasia Dagang.....	92
1. Pengertian Rahasia Dagang	92
2. Lingkup Rahasia Dagang.....	92
3. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang.....	92

6

HUKUM KETENAGAKERJAAN**95***-Erna Ratnaningsih dan Iron Sarira-*

A. Pengantar	95
B. Pengertian dan Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan	96
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	96
2. Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan	98
a. Hukum Ketenagakerjaan Ditinjau dari Hukum Perdata	99
b. Hukum Ketenagakerjaan Ditinjau dari Hukum Pidana	101
c. Hukum Ketenagakerjaan Ditinjau dari Hukum Tata Usaha Negara	103
C. Hukum Positif di Bidang Ketenagakerjaan	105
D. Dinamika Hukum Ketenagakerjaan dan Implementasi Praksisnya	107
1. Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan	108
2. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	110
3. Implementasi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perpu Ciptaker	116
E. Syarat Kerja dan Perjanjian Kerja dalam Hubungan Kerja	117
1. Syarat Kerja (Mikro Kondisional)	117
a. Unsur Adanya Pekerjaan	117
b. Unsur Adanya Upah	118
c. Unsur Adanya Perintah	119
d. Unsur Adanya Waktu Tertentu	119
2. Perjanjian Kerja	120
F. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	122
1. Hubungan Industrial dan Perselisihan Hubungan Industrial	122
2. Pemutusan Hubungan Kerja dan Larangan PHK	124
a. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha/Majikan ...	125
b. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Buruh	125
c. Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum	126
d. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan	126
3. Hak Buruh Setelah PHK	127

4. Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan/Perburuhan	130
a. Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan.....	130
b. Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan.....	133
DAFTAR PUSTAKA	134

7

HUKUM PASAR MODAL 135

–Agus Ryanto–

A. Latar Belakang	135
B. Dasar Hukum Pasar Modal.....	136
C. Hukum Pasar Modal dan Instrumennya di Pasar Modal.....	139
1. Apakah Hukum Pasar Modal itu?	139
2. Instrumen Pasar Modal	140
3. Kelembagaan di Pasar Modal Indonesia.....	141
a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	142
b. Bursa Efek Indonesia (BEI)	142
D. Penawaran Umum dan Pencatatan Saham di BEI	143
1. Penawaran Umum	144
a. Tahap Pra-Emisi.....	145
b. Tahap Emisi	146
c. Tahap Pasca Emisi.....	146
2. Pencatatan Saham di BEI	146
E. Menjadi Perusahaan Publik dengan Keterbukaan Informasi.....	150
F. Aksi Korporasi (<i>Corporate Action</i>)	154
G. Penegakan Hukum di Pasar Modal	155
1. Kejahatan di Pasar Modal	156
a. Informasi yang Menyesatkan (<i>Misleading Information</i>) ...	156
b. Penipuan (<i>Fraud</i>)	157
c. Manipulasi Pasar (<i>Market Manipulation</i>).....	158
d. Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>)	158
2. Pelanggaran di Pasar Modal	159

8

HUKUM PERSAINGAN USAHA 163

–Shidarta–

A. Pendahuluan.....	163
B. Filosofi UU No. 5 Tahun 1999.....	163
C. Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule of Reason</i>	166
D. Anatomi UU No. 5 Tahun 1999.....	168

E. Sanksi.....	173
F. Lembaga KPPU	174
G. Prosedur Beracara di KPPU	175
H. Penutup	182
DAFTAR PUSTAKA	183

9

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

185

-Shidarta-

A. Pengantar	185
B. Subjek-subjek Hukum Perlindungan Konsumen	185
1. Konsumen dan Kelompok Konsumen	185
2. Pelaku Usaha	188
3. Asosiasi Pelaku Usaha	190
4. Kementerian Perdagangan	192
5. Badan Perlindungan Konsumen Nasional	193
6. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	196
7. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	197
8. Peradilan	199
C. Pemetaan	202
D. Prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Konsumen	204
1. Kontrak Bukan Syarat	204
2. <i>Small Claim</i>	204
3. Gugatan Perwakilan Kelompok	205
4. Gugatan LPKSM	205
5. Tanggung Jawab dengan Beban Pembuktian Terbalik	206
E. Isu Penting dalam Perlindungan Konsumen	206
F. Penutup	207
DAFTAR PUSTAKA	208

10

HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

209

-Nirmala Many-

A. Pendahuluan	209
B. Sejarah Hukum Kepailitan	210
C. Definisi Kepailitan	212
D. Tujuan UUKPKPU	213
E. Asas-asas Kepailitan	214

F. Prosedur Kepailitan	214
1. Tidak Adanya Syarat Minimum Jumlah Utang	217
2. Adanya Keharusan untuk Mewakikan Perkara Kepailitan kepada Advokat	218
3. Pengajuan Permohonan Pailit	218
4. Pengaturan Ketentuan Batas Waktu Pemeriksaan Perkara.....	219
5. Pemeriksaan di Hadapan Hakim dengan Susunan Persidangan Majelis.....	220
6. Pemeriksaan dalam Persidangan Terbuka untuk Umum	220
7. Boleh Ada Perbedaan Pendapat Hakim (<i>Dissenting Opinion</i>)	220
8. Upaya Hukum Melalui Mahkamah Agung	221
G. Akibat Putusan Pailit	221
H. Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit.....	222
I. Berakhirnya Kepailitan.....	222
J. Peran Pengadilan Niaga	222
K. Perjanjian Internasional tentang Kepailitan	223
L. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	224
1. Pengertian dan Perbedaan antara PKPU dan Kepailitan	224
2. Jenis-jenis PKPU	225
a. PKPU Sementara	225
b. PKPU Tetap.....	225
3. Hakim Pengawas dan Pengurus	226
4. Panitia Kreditur	226
5. Status Sita dan Eksekusi Jaminan	226
6. Pembayaran Utang Selama Berlangsungnya PKPU.....	226
7. Kompensasi Utang dalam PKPU	227
8. Akibat Permohonan PKPU Tetap Ditolak.....	227
9. Berakhirnya PKPU	227
M. Penutup	227
DAFTAR PUSTAKA	228

11

PENGENALAN HUKUM PAJAK

231

–Batara Mulia Hasibuan–

A. Pendahuluan	231
B. Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak	233
1. Kedudukan Hukum Pajak	240
C. Karakteristik dan Unsur Pajak	243

D. Asas dan Teori Pemungutan Pajak.....	247
1. Teori Asuransi	248
2. Teori Kepentingan	248
3. Teori Daya Pikul/Teori Gaya Pikul	248
4. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti	249
5. Teori Daya Beli	249
E. Fungsi Pajak	250
F. Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak.....	254
1. Subjek Pajak dari Pajak Penghasilan	254
2. Jenis Subjek Pajak	255
3. Pengecualian sebagai Subjek Pajak.....	256
4. Pengertian Objek Pajak dari Penghasilan	257
5. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.....	258
6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	259
7. Wajib Pajak	259
G. Sistem Pemungutan/Pengenaan Pajak	260
1. Menurut Waktu Pemungutan	260
2. Menurut Dasar Pengenaan Pajak	260
3. Menurut yang Menetapkan Pajaknya	263
H. Pajak Pusat dan Daerah	264
1. Pajak Pusat/Pajak Negara.....	265
2. Pajak Daerah	265
I. Peradilan Pajak	266
J. Perpajakan Internasional dan <i>Tax Treaty</i>	268
Sumber-sumber Hukum Pajak Internasional.....	270
DAFTAR PUSTAKA	270

12

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN 273

–Abdul Rasyid–

A. Pendahuluan.....	273
B. Sejarah Singkat Penyelesaian Sengketa	274
C. Definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa	275
D. Model Alternatif Penyelesaian Sengketa	278
1. Negosiasi	278
2. Mediasi.....	280
3. Arbitrase.....	284
DAFTAR PUSTAKA	286



13

TINDAK PIDANA BISNIS 289

–Ahmad Sofian–

A. Pendahuluan.....	289
B. Tindak Pidana Perpajakan.....	291
C. Tindak Pidana Korupsi.....	301
D. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	303
E. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	307
1. Kejahatan Korporasi.....	307
2. Pelanggaran HAM oleh Korporasi.....	309
3. Instrumen Hukum Pelanggaran HAM.....	312
4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	313
DAFTAR PUSTAKA.....	315

14

HUKUM SIBER 319

–Bambang Pratama–

A. Tinjauan Umum.....	319
B. Ruang Lingkup Hukum Siber di Indonesia.....	323
C. UU-ITE dan Cakupannya.....	324
1. Konsep Kepemilikan dalam Ruang Siber.....	326
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual pada UU-ITE.....	327
3. Pengaturan Persaingan Usaha pada UU-ITE.....	328
4. Pengaturan Perlindungan Konsumen pada UU-ITE.....	329
D. Sumbangan Pemikiran untuk UU-ITE ke Depan.....	331
E. <i>E-Commerce Law</i>	333
DAFTAR PUSTAKA.....	337

15

ETIKA BISNIS 341

–Shidarta–

A. Pendahuluan.....	341
B. Nilai, Asas, dan Norma.....	342
C. Pembentukan “Autonomic Legislation”.....	345
D. Etika Bisnis sebagai “Autonomic Legislation”.....	349
E. Penutup.....	355
DAFTAR PUSTAKA.....	355

16

IMPLIKASI ETIS DALAM BISNIS: DALAM KONTEKS HUKUM PARIWISATA

357

–Ahmad Sofian–

A. Pendahuluan.....	357
B. Pengertian Pariwisata Seks Anak.....	358
C. Situasi Global Pariwisata Seks Anak.....	360
D. Pelaku Kejahatan Seks Anak	363
1. Wisatawan Seks Anak Situasional (<i>Situational Sex Offender</i>).....	364
2. Wisatawan Seks Anak Preferensial (<i>Preferential Sex Offenders</i>).....	364
3. Pedofil (<i>Pedophile</i>)	364
E. Instrumen Hukum Internasional tentang Pariwisata Seks Anak...	365
F. Perundang-undangan Nasional	374
DAFTAR PUSTAKA	378

GLOSARIUM

381

PARA PENULIS

403